



**LAPORAN EVALUASI  
HASIL PELAKSANAAN RENJA TA. 2024  
TRIWULAN II  
(Per 30 JUNI 2024)**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

## KATA PENGANTAR

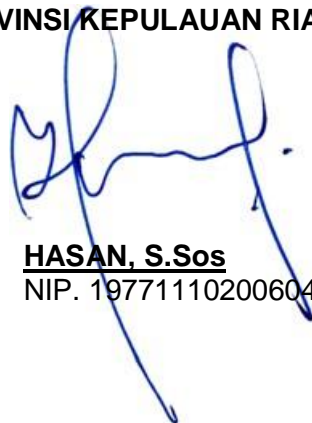
Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga **Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Triwulan II (Per 30 Juni 2024)** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2024 Triwulan II merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Juli 2024

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**HASAN, S.Sos**  
NIP. 197711102006041010

# DAFTAR ISI

Halaman

---

COVER	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah .....	4
BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH .....	7
BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN DPA, RENJA DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH .....	9
3.1. Perbandingan Jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah .....	12
3.2. Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah .....	13
3.3. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah .....	13
BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM ATAU KEGIATAN RENJA .....	15
4.1. Capaian Target Indikator Sasaran .....	15
4.2. Capaian Target Indikator Program .....	16
4.3. Capaian Target Indikator Kegiatan .....	17
4.4. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan .....	19
4.5. Pencapaian Target Anggaran .....	22

BAB V	KENDALA ATAU PERMAALAHAN YANG DIHADAPAI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ATAU KEGIATAN .....	25
BAB VI	PENUTUP .....	26
	A. Kesimpulan .....	26
	B. Rekomendasi .....	27
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan ..... 5
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..... 7
Tabel 3.1	Perbandingan DPA, Renja, dan Renstra Tahun 2023 ..... 9
Tabel 4.1	Pencapaian Target Indikator Sasaran ..... 15
Tabel 4.2	Pencapaian Target Indikator Kinerja Program ..... 16
Tabel 4.3	Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan ..... 17
Tabel 4.4	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan ..... 20
Tabel 4.5	Pencapaian Target Anggaran ..... 22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah Provinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah provinsi dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah provinsi. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah provinsi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

- Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);



19. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 951).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan evaluasi hasil renja tahun 2024 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam renja perangkat daerah tahun 2024;
2. Mendeskripsikan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja renja perangkat daerah tahun 2024;
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2024 dan penyusunan rencana kerja tahun 2025.

### **1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah**

Metode evaluasi renja perangkat daerah meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

#### **a. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

## b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan**

No.	Interval Nilai Evaluasi s/d TW I	Interval Nilai Evaluasi s/d TW II	Interval Nilai Evaluasi s/d TW III	Interval Nilai Evaluasi s/d TW IV	Status
1.	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2.	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3.	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4.	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5.	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

### 1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

### 2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

### 3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**c. Teknik Analisis Data**

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan renja Dinas Komunikasi dan informatika pada tahun 2024 adalah **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi.**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
2. Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi;
3. Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi (*smart service*);
4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2023
I.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Skala Nilai	2,95			
1.		Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Skala Nilai	82	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	82
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	%	40		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	40

			program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	
2.		Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi;	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
			Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
3.		Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi yang terintegrasi ( <i>smart service</i> );	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	30	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30
			Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
4.		Meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	73,63	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	73,63
5.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Predikat	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	BB

### BAB III

## PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA DPA DAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perbandingan DPA, Renja, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan DPA, Renja, Renstra Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	√	√	√
<b>2.16.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	√	√	√
<b>2.16.01.1.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	√	√	√
2.16.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√
2.16.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	X	X	√
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X	X	√
<b>2.16.01.1.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	√	√	√
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√
2.16.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	√	√	√
2.16.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	X	X	√
2.16.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X	X	√
2.16.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	X	X	√
<b>2.16.01.1.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>√</b>
2.16.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Milik Daerah Pada SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	X	X	√
2.16.01.1.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	X	X	√

<b>2.16.01.1.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	√	√	√
2.16.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	X	X	√
2.16.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	√	√	√
2.16.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	X	X	√
2.16.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	X	X	√
2.16.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	X	X	√
2.16.01.1.05.06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	X	X	√
2.16.01.1.05.07	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	X	X	√
2.16.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	X	X	√
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	√
2.16.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	X	X	√
2.16.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X	X	√
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	√	√	√
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√
2.16.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	X	X	√
2.16.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√
2.16.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√
2.16.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjangan Tamu	√	√	√
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√
2.16.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	X	X	√
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X	X	√
<b>2.16.01.1.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>√</b>
2.16.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	X	X	√
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	X	√	√
2.16.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tetap Tak Berwujud	X	X	√
2.16.01.1.07.09	Pengadaan Sarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X	X	√
<b>2.16.01.1.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	√	√	√
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X	√	√
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X	√	√
2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√
<b>2.16.01.1.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	√	√	√
2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√
2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	X	X	√
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralataan dan Mesin Lainnya	√	√	√
2.16.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	X	X	√
2.16.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	X	X	√

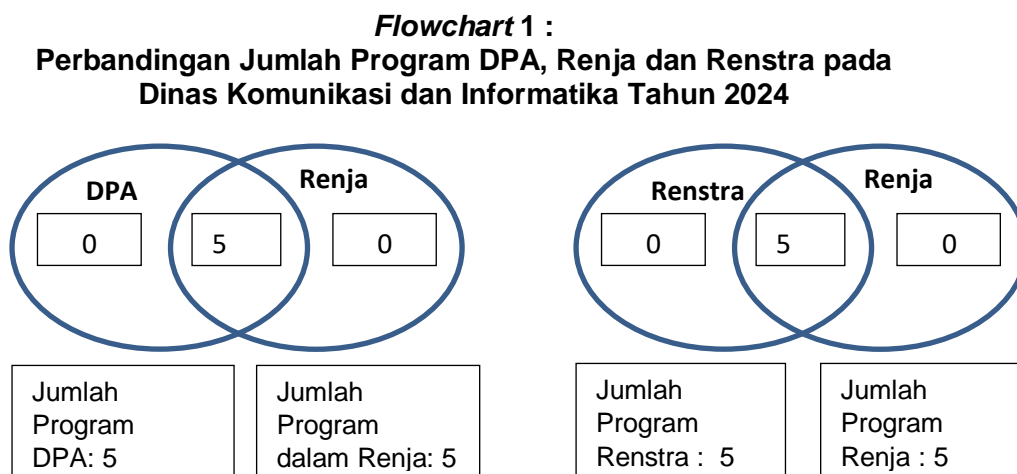
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	X	√	√
2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	X	√	√
2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X	√	√
<b>2.16.02</b>	<b>Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
<b>2.16.02.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
2.16.02.1.01.01	Rumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	X	X	√
2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	X	X	√
2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	√	√	√
2.16.02.1.01.07	Layanan Hubungan Media	√	√	√
2.16.02.1.01.08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	√	√	√
2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	X	X	√
2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	X	√	√
2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	√	√	√
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	√	√	√
2.16.02.1.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√
<b>2.16.03</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
<b>2.16.03.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
2.16.03.1.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	X	X	√
2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	√
2.16.03.1.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	√	√	√
<b>2.16.03.1.02</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
2.16.03.1.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	X	√	√
2.16.03.1.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	√	√	√
2.16.03.1.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	√	√	√
2.16.03.1.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	X	X	√
2.16.03.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	X	X	√
2.16.03.1.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	√	√	√
2.16.03.1.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	√	√	√
2.16.03.1.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	√	√	√
2.16.03.1.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	X	X	√
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	X	√	√



2.16.03.1.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (Gcio)	X	X	√
2.16.03.1.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	√	√	√
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	√	√	√
<b>2.20.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	√	√	√
<b>2.20.02.1.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	√	√	√
2.20.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	√	√	√
2.20.02.1.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	X	X	√
2.20.02.1.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	X	√	√
2.20.02.1.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	X	X	√
2.20.02.1.01.05	Pengembangan Infrastruktur	X	X	√
2.20.02.1.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	X	√	√
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	√	√	√
<b>2.21.02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	√	√	√
<b>2.21.02.1.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	√	√	√
2.21.02.1.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	X	√	√
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	X	X	√
2.21.02.1.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√
<b>2.21.02.1.02</b>	<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	√	√	√
2.21.02.1.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	√

### 3.1 Perbandingan Jumlah Program dalam DPA, Renja dan Resntra Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA dan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dapat dilihat pada *flowchart* berikut:

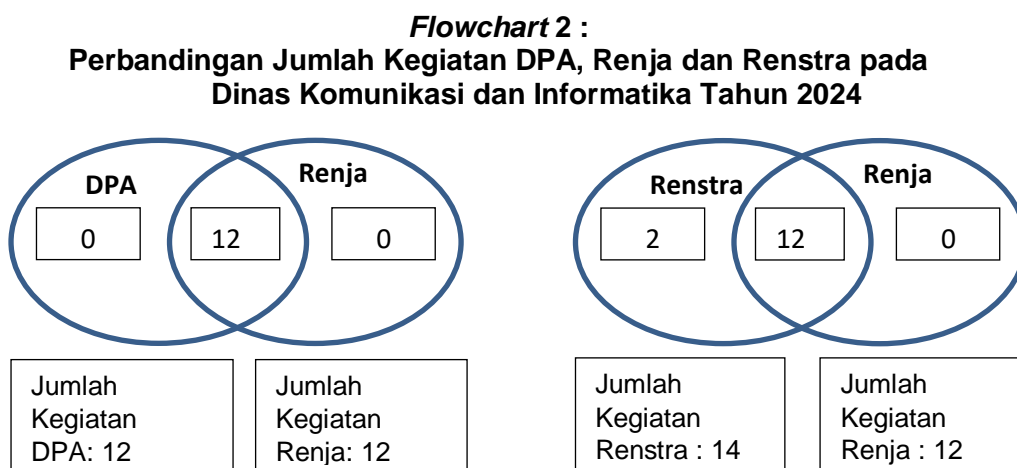


Dari *flowchart* diatas dapat dilihat bahwa:

Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 (DPA) sama dengan jumlah program pada Renja 2023 maupun Renstra 2021-2026.

### 3.2 Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dapat dilihat pada *flowchart* berikut:



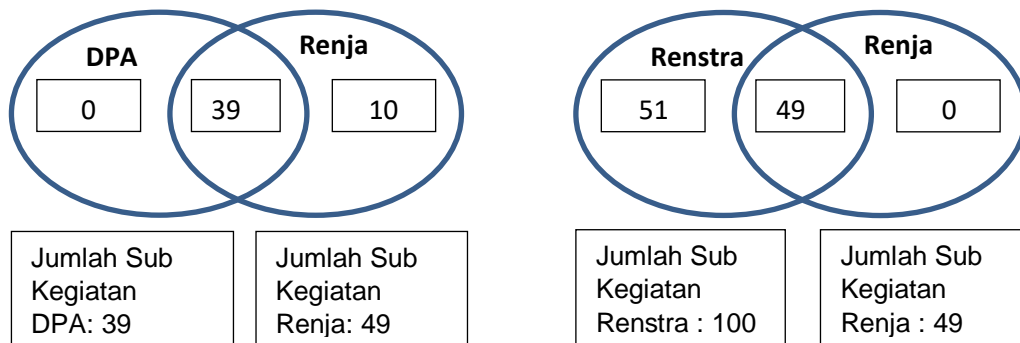
Dari *flowchart* diatas dapat dijelaskan:

Jumlah kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 sama dengan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024. Sementara pada Dokumen Renstra 2021-2026 terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dianggarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

### 3.3 Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan dalam DPA, Renja dan Renstra Perangkat Daerah

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA, Renja dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dapat dilihat pada *flowchart* berikut:

**Flowchart 3 :**  
**Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, Renja dan Renstra pada**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**



Dari *flowchart* diatas dapat dilihat bahwa:

Jumlah Sub kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 sama dengan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024. Sementara pada Dokumen Renstra 2021-2026 terdapat 61 (dua) Sub Kegiatan yang tidak dianggarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024.

## BAB IV

### CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA

#### 4.1 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran

Adapun capaian kinerja indikator sasaran renja yang dievaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.1 Pencapaian Target Indikator Sasaran**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
I	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi	Indeks SPBE	Skala nilai	2,95				Data tersedia pada bulan akhir 2024
1		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skala nilai	82				Data tersedia pada bulan akhir 2024
			Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	40				Data tersedia pada akhir tahun 2024
2		Terwujudnya Penyelenggaraan Satu Data Berbasis Elektronik yang Terintegrasi;	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100				Data tersedia pada akhir tahun 2024
			Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi	%	100				Data tersedia pada akhir tahun 2024

			Pembangunan Daerah						
3		Meningkatnya Layanan Publik Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi yang Terintegrasi ( <i>Smart Service</i> );	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	30				Data tersedia pada akhir tahun 2024
			Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100				Data tersedia pada akhir tahun 2024
4		Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	73,63				Data tersedia pada akhir tahun 2024
5		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	%	100				Data tersedia pada akhir tahun 2024

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Sasaran** dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sasaran belum tersedia karena baru tersedia pada akhir tahun 2024.

#### 4.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program

Capaian indikator kinerja program renja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2 Pencapaian Target Indikator Kinerja Program**

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target Tahun 2024	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skala nilai	82	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	40	20	50,00	ST	Data tersedia pada akhir tahun 2024
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024

		Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	30	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
		Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	86,05	86,05	ST	
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks KAMI	73,63	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase	100	41,40	41,40	T	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Program** rata-rata pencapaian kinerja pada TW II (30 Juni 2024) sebesar 22,18% dengan kategori Sangat Rendah. Adapun rincian indikator kinerja program terdiri dari status Sangat Tinggi sebanyak 2 indikator kinerja program, Status Tinggi sebanyak 1 indikator, dan status Sangat Rendah sebanyak 5 indikator kinerja program. Capaian indikator kinerja program sangat rendah disebabkan realisasi indikator kinerja program belum tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2024.

#### 4.3 Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian indikator kinerja kegiatan renja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target Tahun 2024	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	55,55	55,55	ST	
		Persentase Terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah	%	100	55,55	55,55	ST	
		Persentase Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	55,55	55,55	ST	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	46,20	46,20	ST	

3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	50	50	ST	
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	17,86	17,86	SR	
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	37,50	37,50	S	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pengunjung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	14,67	14,67	SR	
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Menjalankan Kewajiban Sebagaimana Diatur Dalam UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
		Persentase Konten Informasi Terkait Program Dan Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Provinsi Sesuai Dengan Strategi Komunikasi	%	100	50	0,00	ST	
		Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang Dilaksanakan Sesuai dengan Strategi Komunikasi dan SOP yang Telah Ditetapkan	%	100	50	0,00	ST	
		Persentase Komunitas Masyarakat /Mitra Strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi	%	100	50	0,00	ST	
8	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Kegiatan, Kelembagaan dan Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Provinsi yang Diselenggarakan Secara Daring Dengan Memenfaatkan Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	%	76	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
		Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Akses Internet yang Berkualitas yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	86,05	86,05	ST	
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Portal dan Situs Web yang Sesuai Standar	%	80	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
9	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintahdaerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah	%	100	86,05	86,05	ST	
		Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai	%	4	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
		Persentase Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang Terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	%	16,67	-	0,00	SR	
10	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Kompilasi Statistik Sektoral yang Mendapatkan Rekomendasi dari BPS	%	100	-	0,00	SR	
		Persentase Survey Statistik Sektoral yang Mendapatkan Rekomendasi dari BPS	%	100	-	0,00	SR	Data tersedia pada

								akhir tahun 2024
		Persentase Kelengkapan Metadata Indikator Statistik Sektoral	%	100	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
11	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Sistem Elektronik yang Telah Menerapkan Prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasias dan atau Aplikasi Persandian	%	97,74	72,09	76,10	ST	
		Persentase Kegiatan Strategis yang Telah Diamankan Melalui Kegiatan Pengamanan Sinyal	%	80	72,09	90,12	ST	
		Persentase Sistem Elektronik/Asset Informasi yang Telah Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	100	72,09	72,09	ST	
12	Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi	Persentase titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	%	72,09	72,09	72,09	ST	
13	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Titik yang Diamankan Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	%	100	48,84	48,84	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Kegiatan** rata-rata pencapaian kinerja pada TW II (30 Juni 2024) sebesar 38,55% dengan kategori Rendah. Adapun rincian indikator kinerja kegiatan terdiri dari status Sangat Tinggi sebanyak 14 indikator kinerja kegiatan, status Sedang sebanyak 1 indikator kinerja kegiatan, dan status Sangat Rendah sebanyak 11 indikator kinerja kegiatan. Capaian indikator kinerja kegiatan sangat rendah disebabkan realisasi indikator kinerja kegiatan belum tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2024.

#### 4.4 Capaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Adapun capaian kinerja indikator sub kegiatan renja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan**

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Capaian Target Tahun 2024	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	1	50	ST	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Laporan	5	3	60	ST	



		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	46	39	42,40	T		
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	5	50	ST		
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	180	180	100	ST		
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	3	-	0,00	SR		
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	50	-	0,00	SR		
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	-	0,00	SR		
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	20	-	0,00	SR		
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	300	150	50	ST		
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	-	0,00	SR		
12.	Fasilitasi Kunjangan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024	
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan dan konsultasi SKPD	Laporan	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024	
14.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024	
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024	
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024	
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	3	1	33,33	S		
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	10	4	40	T		
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024	

20.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi public	Dokumen	12	6	50	ST	
21.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi public	Dokumen	12	6	50	ST	
22.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Dokumen	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
23.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Dokumen	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
24.	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Layanan	2	1	50	SR	
25.	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah dokumen kemitraan dengan pemangku kepentingan	Dokumen	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
26.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Dokumen	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
27.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Dokumen	1	1	100	ST	Data tersedia pada akhir tahun 2024
28.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	Unit	1	-	0,00	SR	
29.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi	Dokumen	4	2	50	ST	
30.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Unit	41	37	90,24	ST	
31.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen	3	1	33,33	SR	
32.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	Unit	41	37	90,24	ST	
33.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Dokumen	2	1	50	ST	
34.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan	Unit	13	8	61,54	ST	
35.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Layanan	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir

								tahun 2024
36.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
37.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Dokumen	1	-	0,00	SR	Data tersedia pada akhir tahun 2024
38.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	OPD	41	31	75,61	ST	
39.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	OPD	41	31	75,61	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** rata-rata pencapaian kinerja pada TW II (30 Juni 2024) sebesar 32,92% dengan kategori Sangat Rendah. Adapun rincian capaian indikator kinerja sub kegiatan terdiri dari status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 15 Sub Kegiatan, status Tinggi (T) sebanyak 2 Sub Kegiatan, status Sedang (S) sebanyak 1 Sub Kegiatan, status Sangat Rendah (SR) sebanyak 21 Sub Kegiatan. Capaian indikator kinerja sub kegiatan sangat rendah disebabkan realisasi indikator kinerja sub kegiatan belum tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2024.

#### 4.5 Pencapaian Target Anggaran

Adapun realisasi anggaran renja yang dievaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 4.5 Pencapaian Target Anggaran**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Realisasi Anggaran	Kategori Kinerja Anggaran (Status)
		Pagu DPA	Realisasi		
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>39.350.548.800</b>	<b>17.116.487.489</b>	<b>43,96</b>	<b>T</b>
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>13.330.429.549</b>	<b>6.887.250.788</b>	<b>51,67</b>	<b>ST</b>
<b>I.1.</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>168.248.190</b>	<b>54.066.864</b>	<b>32,14</b>	<b>R</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.102.390	25.898.164	30,79	R
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.145.800	28.168.700	33,48	S
<b>I.2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.757.090.571</b>	<b>5.209.279.259</b>	<b>53,39</b>	<b>ST</b>
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.223.444.571	4.968.451.259	53,87	ST
4.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	533.646.000	240.828.000	45,13	ST
<b>I.3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>107.524.000</b>	<b>87.356.000</b>	<b>81,24</b>	<b>ST</b>
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.500.000	87.356.000	99,84	ST
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.024.000	0	0,00	SR
<b>I.4.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>526.222.308</b>	<b>171.766.860</b>	<b>32,64</b>	<b>R</b>

7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	795.500	7,96	SR
8.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	0	0,00	SR
9.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	2.260.000	7,53	SR
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.047.000	14.581.200	23,50	SR
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	0	0,00	SR
12.	Fasilitas Kunjangan Tamu	25.000.000	3.935.000	15,74	SR
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.175.308	150.195.160	40,14	T
<b>I.5.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.553.470.480</b>	<b>1.283.408.805</b>	<b>50,26</b>	<b>ST</b>
14.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.500.000	10.500.000	24,71	SR
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	73.357.741	36,68	S
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.970.480	1.199.551.064	51,91	ST
<b>I.6.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>217.874.000</b>	<b>81.373.000</b>	<b>37,35</b>	<b>S</b>
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	192.500.000	77.418.000	40,22	T
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000	3.955.000	30,42	R
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.374.000	0	0,00	SR
<b>II.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>18.851.191.426</b>	<b>7.694.109.229</b>	<b>40,81</b>	<b>T</b>
<b>II.1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>18.851.191.426</b>	<b>7.694.109.229</b>	<b>40,81</b>	<b>T</b>
20.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	67.077.100	22.113.802	32,97	R
21.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	856.212.970	311.218.558	36,35	S
22.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	245.990.430	87.610.000	35,62	S
23.	Pelayanan Informasi Publik	476.385.888	102.884.664	21,60	SR
24.	Layanan Hubungan Media	10.876.844.489	4.643.268.676	42,69	T
25.	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	3.623.038.857	1.276.076.480	35,22	S
26.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	720.641.692	176.612.049	24,51	SR
27.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	700.000.000	700.000.000	100	ST
28.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Provinsi	1.285.000.000	374.325.000	29,13	R
<b>III.</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>6.753.825.879</b>	<b>2.535.127.472</b>	<b>37,54</b>	<b>S</b>
<b>III.1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>4.872.203.663</b>	<b>1.786.752.898</b>	<b>36,67</b>	<b>S</b>
29.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.592.048	18.270.754	34,74	S
30.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.819.611.615	1.768.482.144	36,69	S
<b>III.2.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>1.881.622.216</b>	<b>748.374.574</b>	<b>39,77</b>	<b>T</b>
31.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	45.984.300	10.944.172	23,80	SR
32.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	559.802.960	129.401.909	23,12	SR
33.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dan Informasi Elektronik	175.127.996	43.358.895	24,76	SR
34.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.007.232.590	544.973.863	54,11	ST
35.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	35.238.335	4.412.035	12,52	SR
36.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	58.236.035	15.283.700	26,24	R
<b>IV.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>147.746.448</b>	<b>32.382.862</b>	<b>21,92</b>	<b>SR</b>
<b>IV.1.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>147.746.448</b>	<b>32.382.862</b>	<b>21,92</b>	<b>SR</b>
37.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektor	147.746.448	32.382.862	21,92	SR
<b>V.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>267.355.498</b>	<b>39.163.358</b>	<b>14,65</b>	<b>SR</b>
<b>V.1.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>158.261.300</b>	<b>18.449.752</b>	<b>11,66</b>	<b>SR</b>
38.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	158.261.300	18.449.752	11,66	SR
<b>V.2.</b>	<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>109.094.198</b>	<b>20.713.606</b>	<b>18,99</b>	<b>SR</b>
39.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	109.094.198	20.713.606	18,99	SR

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika TW II (30 Juni 2024) sebesar **Rp. 17.188.033.709,-** atau **43,68%**.
2. Status pencapaian realisasi anggaran pada TW II (30 Juni 2024) terdiri dari status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 6 Sub Kegiatan, status Tinggi (T) sebanyak 3 Sub Kegiatan, status Sedang (S) sebanyak 7 Sub Kegiatan, status Rendah (R) sebanyak 5 Sub Kegiatan dan status Sangat Rendah (SR) sebanyak 18 Sub Kegiatan.

## BAB V

### KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENJA

Dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau ditemukan beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran TW II (30 Juni 2024) telah melebihi yang telah ditetapkan (target anggaran TW II sebesar **27,90%** sementara ralisasi TW II sebesar **43,68%**).
2. Terdapat beberapa sub kegiatan dalam penyerapan anggaran TW II masih rendah dan sangat rendah, hal ini disebabkan adanya pergeseran kode rekening dan terbatasnya aliran kas yang diberikan sehingga pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan belum berjalan maksimal.
3. Terdapat beberapa sub kegiatan dengan capaian kinerja sub kegiatan yang masih rendah atau sangat rendah, hal ini disebabkan data capaian kinerja sub kegiatan diperoleh diakhir tahun 2024.
4. Masih ada dokumen administrasi yang belum dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2024 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 5 (lima) Program yang terbagi atas 12 (dua belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh delapan) Sub Kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan I tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun rata-rata pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah **22,18%** dengan Kategori Sangat Rendah;
2. Rata-rata capaian kinerja Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah **38,55%** dengan Kategori Sedang;
3. Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri sampai Triwulan II Tahun 2024 adalah **32,92%** dengan Kategori Sangat Rendah;
4. Sementara rata-rata capaian keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau sampai Triwulan II Tahun 2024 mencapai **Rp. 17.188.033.709,-** atau **43,68%** (kategori Tinggi).

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tahun anggaran 2024 pada triwulan II telah berjalan dengan baik.









Evaluasi Hasil terhadap Kinerja Perangkat Daerah Limpuk Provinsi Kepulauan Riau  
 Periode Pelaksanaan : Triwulan 1 Tahun 2024  
 (Formulir E.55 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika																																					
No.	Tujuan dan Sasaran	Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Usuan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Kempendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2024 yang dievaluasi (Konversi ke Renstra Kemendagri 050-3708)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (%)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET				
						5		6		7a (RENJA)		7b (DPA mumi)		8		9		10		11		12		12a (Konversi)		13=12/7*100		Kinerja		14 = 6 + 12		15 = 13/5 x 100%		16	17		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	
1.6		2.16.01.1.07	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.517.484.796	100	177.649.644	%	100	64.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45		2.16.01.1.07.03	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	Unit	4	350.000.000	0																													
46		2.16.01.1.07.04	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	Unit	6	693.484.796	0																													
47		2.16.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel yang Disediakan	Unit	64	300.000.000	0																													
48		2.16.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Unit/Barang	33	260.000.000	12	177.649.644		5	64.000.000																									
49		2.16.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya yang Disediakan	Unit/Barang	40	110.000.000	0																													
50		2.16.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak berwujud yang Disediakan	Unit	6	154.000.000	0																													
51		2.16.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Unit	10	150.000.000	0																													
52		2.16.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan pasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Unit/Barang	4	500.000.000	0																													
53		2.16.01.1.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan	Unit/Barang	4	40.000.000	0																													
1.7		2.16.01.1.08	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	10.732.500.000	100	4.589.165.813	%	100	2.585.400.000	100	2.553.470.480	18,75	567.462.688	37,50	715.946.117	-	-	37,50	1.283.408.805	37,50	50,26	S	ST	138	5.872.574.618	137,50	54,72							
54		2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	25.000.000	0			1	5.000.000																									
55		2.16.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan	Laporan	5	159.000.000	0			1	50.000.000	1	200.000.000	-	25.147.919	-	48.209.822			0,00	73.357.741	36,68		S	0	73.357.741	0,00	46,14								
56		2.16.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Unit/Barang	50	520.000.000	1	42.136.000		1	150.000.000	1	42.500.000	-	10.500.000	-	-			0,00	10.500.000	0,00	24,71	SR	SR	1	52.636.000	2,00	10,12							
57		2.16.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Laporan	175	10.028.500.000	14	4.547.029.813		1	2.380.400.000	1	2.310.970.480	-	531.814.769	-	667.736.295			0,00	1.199.551.064	0,00	51,91	SR	ST	14	5.746.580.877	8,00	57,30							
1.8		2.16.01.1.09	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.729.157.076	100	207.373.600	%	100	1.365.105.276	100	217.874.000	6,67	37.950.000	14,67	46.963.000	-	-	14,67	81.373.000	14,67	37,35	SR	S	115	288.746.600	114,67	4,29							
58		2.16.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	Unit	15	1.102.150.000	6	179.279.200		3	200.000.000	3	192.500.000		37.950.000	1	39.468.000			1,00	77.418.000	33,33	40,22	S	T	7	256.697.200	46,67	23,29							
59		2.16.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	159	411.900.000	0																													
60		2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Unit/Barang	20	220.000.000	20	38.094.400		100	50.000.000	10	13.000.000	-	4	3.955.000			4,00	3.955.000	4	40,00	30,42	T	R	24	32.049.400	120,00	14,57							
61		2.16.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	20	220.000.000	0																													
62		2.16.01.1.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang mendapatkan pemeliharaan	Unit	20	220.000.000	0																													
63		2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Unit	2	2.915.107.076	0			1	865.105.276	1	12.374.000	-	-	3.540.000			0,00																	
64		2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Unit	2	220.000.000	0																													
65		2.16.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan pasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Unit	2	320.000.000	0			1	50.000.000																									
66		2.16.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan pasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Unit	5	1.100.000.000	0			1	200.000.000																									
II		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Skala 0-100	86	16.240.736.723	96,05	61.087.450.222	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai Skala 0-100	82	24.288.301.307	82	18.851.191.426	1.332.313.356	-	-	0,00	7.694.109.229	0,00	40,81	SR	T	96	68.781.599.456	111,69	423,51									
				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyediaan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	60		30		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyediaan informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	40	40	20						20,00		50,00		ST	50		-	83,33									
II.1		2.16.02.1.01	Kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah provinsi	Persentase perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100	16.240.736.723	100	61.087.450.222	Persentase perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	%	100	24.288.301.307	100	18.851.191.426	1.332.313.356	-	-	0,00	7.694.109.229	0,00	40,81	SR	T	100	68.781.599.456		423,51									
				Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	%	100		100		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	%	100		50						50,00		50,00		ST	150		-	150,00									

Evaluasi Hasil terhadap Kinerja Perangkat Daerah Limpuk Provinsi Kepulauan Riau  
 Periode Pelaksanaan : Triwulan 1 Tahun 2024  
 (Formulir E.55 Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Tujuan dan Sasaran	Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Uraian/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah		Indikator Kinerja (Kempendagri No. 050-5889 Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah 2024 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja Renja PD 2024 yang dievaluasi (Konversi ke Renstra Kemendagri 050-3708)		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (%)		Kategori Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	KET	
						K	Rp.	K	Rp.	Indikator	Satuan	7a (RENJA)		7b (DPA mumi)		8	9		10		11	12		12.a (Konversi)	13=12/7*100		Kinerja	Anggaran	14 = 6 + 12		15 = 13/5 x 100%			
												K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.	K			Rp.
				Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	%	100		100		%	100	100		50						50,00	-	50,00	50,00	37,50	ST		150	-	150,00					
				Persentase komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	%	100		100		%	100	100		50						50,00	-	50,00	50,00	37,50	ST		150	-	150,00					
67		2.16.02.1.01.01	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kebijakan	2	30.000.000	0		Dokumen																0	-	0,00	0,00					
68		2.16.02.1.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan monitoring dan aspirasi publik	dokumen	60	1.133.000.000	24	386.430.033	Dokumen	12	230.400.000	12	67.077.100	3	2.191.100	3	19.922.702		6,00	22.113.802	6	50,00	32,97	ST	R	30	408.543.837	50,00	36,06				
69		2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan hasil Monitoring Informasi dan pelaksanaan agenda prioritas komunikasi pemerintahan daerah	dokumen	60	30.000.000	0		Dokumen																	0	-	0,00	0,00				
70		2.16.02.1.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen konten media komunikasi publik yang diproduksi	dokumen	60	529.250.000	24	3.527.304.644	Dokumen	12	1.867.831.071	12	856.212.970	3	156.607.608	3	154.610.959		6,00	311.218.558	6	50,00	36,35	ST	S	30	3.838.523.207	50,00	725,28				
71		2.16.02.1.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang telah terkelola dengan baik	Media Pemda	25	3.579.500.000	6	5.275.828.707	Dokumen	1	1.643.152.249	1	245.990.430	-	4.986.100	-	82.623.900		0,00	87.610.000		0,00	35,62	SR	S	6	5.363.438.707	24,00	149,84				
				Media Komunikasi Telemas		245		34																		34	-	13,88						
72		2.16.02.1.01.06	Pelayanan informasi publik	Jumlah perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	OPD	41	1.166.000.000	42	396.997.656	Dokumen	1	233.200.000	1	476.385.888	-	52.961.097	-	49.923.567		0,00	102.898.664		0,00	21,60	SR	SR	42	499.882.320	102,44	42,87				
73		2.16.02.1.01.07	Layanan hubungan media	Jumlah layanan hubungan media	Layanan	14	45.000.000	3	32.583.760.020	Layanan	3	14.598.220.548	2	10.876.944.489	-	589.396.858	1	4.053.871.818		1,00	4.643.268.674	1	50,00	42,69	ST	T	4	37.227.028.696	28,57	82.726,73				
74		2.16.02.1.01.08	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	Jumlah mitra strategis Pemda	60	730.750.000	13	11.999.042.487	Dokumen	1	3.919.839.012	1	3.623.038.857	-	343.372.988	-	932.703.492		0,00	1.276.074.480		0,00	35,22	SR	S	13	13.275.118.967	21,67	1.816,64				
				Facilitasi literasi digital	Orang	750		0																			0	-	0,00					
75		2.16.02.1.01.09	Manajemen komunikasi krisis	Jumlah narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintahan daerah yang di counter oleh pemerintah daerah	Isu Publik	60	50.000.000	0		Dokumen																	0	-	0,00	0,00				
76		2.16.02.1.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Peserta Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik	Orang	375	235.000.000	150	53.121.500	Orang	75	25.000.000								0,00	-		0,00		SR		150	53.121.500	40,00	22,60				
77		2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola komunikasi di Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan tata kelola komunikasi informasi di Daerah	Dokumen	5	4.941.750.000	2	1.721.826.177	Dokumen	1	984.350.000	1	720.641.692	-	91.347.605	-	85.264.444		0,00	176.612.049		0,00	24,51	SR	SR	2	1.898.438.222	40,00	38,42				
78		2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dukungan administratif, keuangan dan tata kelola KPMD Provinsi Kepri	Dokumen	5	3.731.647.008	2	1.501.000.000	Dokumen	1	761.308.436	1	700.000.000	-	-	1	700.000.000		1,00	700.000.000	1	100,00	100,00	ST	ST	3	2.201.000.000	60,00	58,98				
79		2.16.02.1.01.13	Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik/pemerintah daerah provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	4	38.839.715	1	3.642.139.900	Unit	1	25.000.000	1	1.285.000.000	-	91.450.000	-	282.875.000		0,00	374.325.000		0,00	29,13	SR	R	1	4.016.464.000	25,00	10.341,13				
III		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	40	16.998.202.276	26,23	15.472.178.311	%	30	2.924.664.349	30	6.753.825.879	1.033.037.866	1.502.089.606	-	-	0,00	2.535.127.472		0,00	37,54	SR	S		18.007.305.784		105,94					
				Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		86,05		%	100,00	100		86,05	86,05					86,05		86,05			ST									
III.1		2.16.03.1.01	Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain di lingkungan pemerintah daerah provinsi	Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintahan provinsi yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara	%	87	7.802.202.276	82,81	9.605.777.616	%	76	1.211.514.349	76	4.872.203.663	723.245.564	1.063.507.334	-	-	0,00	1.786.752.898		0,00	36,67	SR	S		11.392.530.517							
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	82,93		86,05		%	100,00	100,00		86,05	86,05					86,05		86,05			ST									
				Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100		74,42		%	80,00	80,00								0,00		0,00			SR									
80		2.16.03.1.01.01	Pendaftaran nama domain Pemerintah Provinsi	Jumlah laporan pendaftaran nama domain dan sub domain Pemerintah Provinsi	Dokumen	5	25.000.000	0		Dokumen																	0	-	0,00	0,00				
81		2.16.03.1.01.02	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	5	155.600.000	5	168.319.744	Dokumen	4	36.400.000	4	52.592.048	1	9.944.701	1	8.326.053		2,00	18.270.754	2	50,00	34,74	ST	S	7	186.590.503	140,00	119,92				



